



Wabup Hadiri Rakor BPK-RI WTP Tak Jamin Bebas Kecurangan

PONTIANAK-RK. Wakil Bupati, Yohanes Ontot bersama Wabup se-Kalbar menghadiri rapat koordinasi optimalisasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, Selasa (09/06) di Balai Petiuh, Pontianak.

Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar, Cornelis. Dikatakan Cornelis, Predikat Opini WTP yang telah diraih Pemprov Kalbar, bukanlah merupakan tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

"Opini WTP tidaklah menjamin pengelolaan dan per-

tanggungjawaban keuangan bebas dari kecurangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan tanggungjawab BPK terletak pada pernyataan opini laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan," kata Cornelis.

Sedangkan Ketua VI BPK-RI, Bahrullah Akbar mengatakan laporan keuangan Pemprov Kalbar 2014, telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Namun ia juga membeberkan pengelolaan aset tetap tanah, peralatan mesin, gedung maupun bangun-



Wabup di antara peserta yang hadir di Rakor BPK RI Pontianak

nan di enam SKPD yang dinilai belum tertib.

Keenam SKPD tersebut yaitu: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas

Pertanian, Biro Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan RSUD dr. Soedarso.

BPK RI berharap Pemda dan DPRD dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK guna mendorong transparansi, akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, dan menyampaikan hasil tindak lanjutnya ke BPK-RI Perwakilan Kalbar setelah-lambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima.

"Itu sesuai undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara," terangnya. **(KIA-humas)**